

2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN
TELP. (0271) 495041, FAK.495522

Website : <http://disdikbud.karanganyarkab.go.id>

E-mail : disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712
KARANGANYAR.

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sedangkan pedoman penyusunan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Merujuk pada perpres tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dalam menangani pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2023 ini tidak sekedar memenuhi laporan, ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap pencapaian sasaran dan target dibidang pembangunan pendidikan dan kebudayaan Laporan ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja. Selain itu juga sebagai bahan pemberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dan bahan perbaikan yang berkesinambungan untuk memperbaiki kinerjanya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan terutama di Kabupaten Karanganyar dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar selama tahun 2023 Harapan kami laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa datang bagi seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Drs. AGAM BINTORO., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650601 199203 1 007

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2

1.3. Aspek Serta Permasalahan Utama 4

1.4. Landasan Hukum 4

1.2. Sistematika..... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Penetapan Kinerja Utama (IKU) 8

2.2. Rencana Strategis (RENSTRA) 9

2.3. Perjanjian Kinerja 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... 14

3.2. Realisasi Anggaran..... 23

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan..... 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu faktor strategis untuk mewujudkan daya saing daerah. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan perekonomian daerah dan perkembangan demokrasi karena terkait dengan kecerdasan dan kreatifitas masyarakat. Perlu disadari pula bahwa Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar merupakan bagian integral dari suatu sistem sosial yang lebih besar, yaitu terkait budaya, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Dalam rangka mendukung kemandirian daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dituntut untuk dapat merencanakan pembangunan daerah dengan cermat, termasuk perencanaan pembangunan urusan pendidikan dan kebudayaan. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar, sebagai salah satu faktor untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Kewajiban instansi pemerintah dalam melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam hal ini wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pihak terkait yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini.

Isu dan permasalahan pendidikan bersifat kompleks dan lintas sektoral. Dikatakan kompleks karena banyaknya faktor yang saling

terkait sebagai penyebab belum meningkatnya mutu pendidikan. Sementara disebut isu lintas sektoral karena permasalahannya terdapat di hampir semua sektor, dan karenanya penanganan permasalahan tersebut harus melibatkan seluruh sektor pembangunan.

Menyadari hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang merupakan organisasi perangkat daerah yang diberi amanat dan tugas serta tanggungjawab dalam menangani pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Karanganyar telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati serta sebagai panduan untuk menangani isu dan permasalahan tersebut.

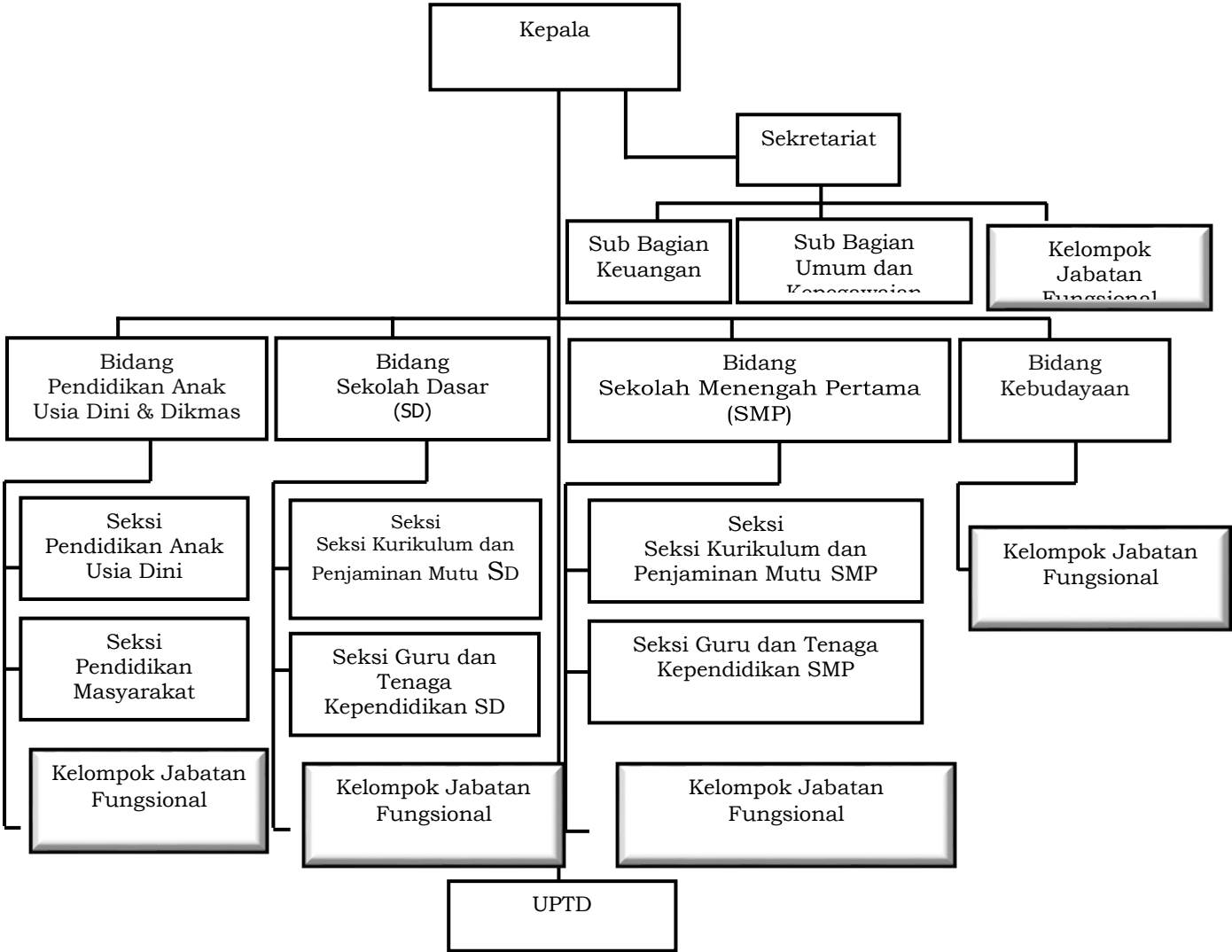
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

a. Berdasarkan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dan Peraturan Bupati Karanganyar nomor 102 tahun 2021, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan Tata kerja Dinas Daerah. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Sekolah Dasar (SD) membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5) Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SD);

- b. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMP;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6) Bidang Kebudayaan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Upaya pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan terus dilakukan namun masih ada beberapa permasalahan diantaranya :

- a. Masih kurangnya tenaga pendidik terutama untuk jenjang SD sederajat
- b. Peraturan baru bahwa dihapusnya UPT sehingga kabupaten kesulitan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi langsung dengan dengan jenjang SD dan TK yang mana jumlah SD sebanyak 501 sekolah dan TK/RA sejumlah 901 lembaga.
- c. Belum ada tenaga administrasi pada jenjang SD sehingga pengelolaan administrasi sekolah SD belum optimal karena diampu oleh pendidik/guru.
- d. Adanya kebijakan-kebijakan baru yang harus dilaksanakan dengan sifatnya mendadak dan kebijakan tersebut sebenarnya belum siap, hal ini sangat menjadikan kesulitan dalam pengimplementasian.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);

14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11).

1.5. Sistematika

Sistematika Penulisan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Penetapan Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan penetapan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintahan perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan organisasi pemerintah daerah (OPD) masing-masing.

Selain sebagai ukuran keberhasilan indikator kinerja utama juga bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Untuk mendapatkan gambaran keberhasilan yang diraih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar telah menetapkan indikator Utama yaitu :

- 1) Angka Harapan lama Sekolah
- 2) Angka Rata-rata lama Sekolah

Sedangkan Indikator sasaran, Tujuan, Sasaran yang harus dicapai yaitu:

1. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pendidikan:
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan.

Indikator Sasaran:

- 1) Angka partisipasi sekolah
- 2) Angka putus sekolah SD/MI
- 3) Angka putus sekolah SMP/MTs
- 4) Angka melanjutkan
- 5) Persentase fasilitas pendidikan SD/MI dalam kondisi baik
- 6) Persentase fasilitas pendidikan SMP/MTs dalam kondisi baik

2. Tujuan : Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan

Sasaran : Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan

Indikator Sasaran

- 1) Rata-rata Penyelenggaraan festival seni dan budaya
- 2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan

3. Tujuan : Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Sasaran: Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Indikator sasaran:

- 1) Nilai SAKIP
- 2) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut telah tercapai. Untuk melihat sejauhmana sasaran-sasaran tersebut tercapai perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP).

Laporan kinerja Tahun lalu dapat dijadikan sebagai feedback yang berharga dalam memperbaiki kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dimasa mendatang

Berikut lampiran target kinerja tahun 2023 yang dapat dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Pada dasarnya realisasi sudah mencapai diatas target yang terdapat pada RPJMD, namun masih perlu ditingkatkan lagi untuk beberapa macam indikator.

NO	Indikator Utama	2023	
		target	Capaian
1	Angka Harapan lama Sekolah	13,81	13.71
2	Angka Rata-rata lama Sekolah	8,8	9.02

II.2. Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar telah menyusun renstra dimana renstra ini setiap tahun digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan acuan bagi penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) organisasi pemerintah daerah (OPD).

Renstra ini berlaku selama 5 tahun dan merupakan penjabaran dari visi dan misi bupati yang dijabarkan ke dalam tahapan dan sasaran sebagai berikut:

Program dalam Misi Bupati nomor 3 yaitu Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis. Program Unggulan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung misi Mewujudkan Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis, dengan menentukan indikator sasaran sebagai berikut :

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2023	
				target	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka partisipasi sekolah	95,25	99,62
2			Angka putus sekolah SD/MI	0,03	0,004
3			Angka putus sekolah SMP/MTs	0,14	0,003
4			Angka melanjutkan	95,25	99,62
5			Persentase fasilitas pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	83	86
6			Persentase fasilitas pendidikan SMP/MTs dalam kondisi baik	87	88,2
7	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	90	100
8			Prosentase kelompok seni budaya yang aktif	13,75	88,99
9	Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel,	Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel,	Nilai SAKIP	73	71,20
10			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,26	84.89

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2023	
				target	Capaian
	efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas			

Dengan fokus pada : kualitas **SDM yang kreatif, inovatif, produktif, berdaya saing dan menggunggulkan kearifan lokal**. Tantangan yang harus ditaklukan adalah pembuktian daya kreasi dan inovasi masyarakat. **Pembangunan masyarakat pembelajar (*learning society*)** menjadi isu strategis untuk mendukung terwujudnya SDM yang kreatif, inovatif, produktif, berdaya saing dan menggunggulkan kearifan lokal. Isu ini menjawab tantangan isu nasional implementasi Undang-Undang No. 5 tahun 2017 berkaitan dengan Strategi Pemajuan Budaya Indonesia mengamanatkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Tujuan dari Pemajuan Kebudayaan adalah: (a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; (b) memperkaya keberagaman budaya; (c) memperteguh jati diri bangsa; (d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; (e) mencerdaskan kehidupan bangsa; (f) meningkatkan citra bangsa; (g) mewujudkan masyarakat madani; (h) meningkatkan kesejahteraan rakyat; (i) melestarikan warisan budaya bangsa; dan (j) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional

Program pembangunan urusan pendidikan yang mendukung misi ini adalah:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- 2) Program pengelolaan pendidikan;
- 3) Program pengembangan kurikulum;
- 4) Program pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) Program pengendalian perizinan pendidikan;
- 6) Program pengembangan kebudayaan
- 7) Program pengembangan kesenian tradisional

- 8) Program pembinaan sejarah
- 9) Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Tujuan, Sasaran yang harus dicapai yaitu :

1. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pendidikan:
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
Indikator Sasaran:
 - 1) Angka Harapan lama Sekolah
 - 2) Angka Rata-rata lama Sekolah
 - 3) Angka partisipasi sekolah
 - 4) Angka putus sekolah SD/MI
 - 5) Angka putus sekolah SMP/MTs
 - 6) Angka melanjutkan
 - 7) Persentase fasilitas pendidikan SD/MI dalam kondisi baik
 - 8) Persentase fasilitas pendidikan SMP/MTs dalam kondisi baik
2. Tujuan : Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan
Sasaran : Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan
Indikator Sasaran
 - 1) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
 - 2) Prosentase kelompok seni budaya yang aktif
3. Tujuan : Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas
Sasaran: Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas. Indikator sasaran:
 - 1) Nilai SAKIP
 - 2) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

II.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD) yang menerima amanah atau tanggungjawab kerja dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggungjawab kerja. Dengan demikian perjanjian kinerja yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan

langsungnya.

Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Manfaat dari perjanjian kinerja bagi pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2023 sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2023, dapat disajikan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, meliputi Indikator Kinerja Utama, Capaian Indikator Kinerja Sasaran, Aspek Keuangan evaluasi kinerja dan Strategi Pemecahan Masalah Capaian kinerja yang digunakan untuk mengidentifikasi seluruh program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

Tabel Capaian Indikator Utama sebagai berikut

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber data
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar						
		Harapan Lama Sekolah	13,98	13,71	98,07 %	Belum Tercapai	DISDIK BUD/ BPS
		Rata-rata Lama Sekolah	8,71	9,02	103,56 %	Tercapai	DISDIK BUD/ BPS
2	Meningkat nya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan						
		Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	90	100	111,11 %	Tercapai	DISDIK BUD
		Persentase kelompok seni budaya yang aktif	13,75	88,99	647,2 %	Tercapai	DISDIK BUD
3	Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel,						
		Nilai SAKIP	73	71,20	97,53 %	Belum Tercapai	DISDIK BUD
		Indeks	81,26	84.89	104,47	Tercapai	DISDIK

	efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kepuasan Masyarakat (IKM)			%		BUD
--	--	---------------------------	--	--	---	--	-----

Pada pilar ketersediaan dapat dilihat dari pencapaian indikator telah melebihi target yang ditentukan pada tahun ke dua (2) Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada bidang Pendidikan. Dari tahun ke tahun diperoleh capaian yang selalu meningkat dan selalu di atas target yang ditentukan, sehingga dapat dikatakan pada pencapaian indikator bidang pendidikan sudah ini **berhasil**.

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel Perbandingan dengan tahun yang lalu :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar										
		Harapan Lama Sekolah	13,81	13,69	99,13 %	13,87	13,7	98,77 %	13,98	13,71	98,07 %
		Rata-rata Lama Sekolah	8,66	8,57	98,96 %	8,67	8,79	101,38 %	8,71	9,02	103,56 %
2	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan										
		Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	88,5	100	112,99 %	90	100	111,11 %	90	100	111,11 %
		Persentase kelompok seni budaya	13,45	88,98	661,56 %	13,6	88,98	654,26 %	13,75	88,99	647,2 %

		yang aktif									
3	Meningkat nya pemerinta han yang akuntanbe l, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas										
		Nilai SAKIP	65	79,18	121,81 %	76	71,20	93,68 %	73	71,20	97,53 %
		Indeks Kepuasa n Masyarak at (IKM)	80	85,67	107,09 %	80,4	80,41	100,01 %	81,2 6	84.89	104,47 %

Pada pencapaian indikator Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2023 mencapai 13,71, meningkat 0,01% dibanding tahun 2022 sebesar 13,70%. Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 sebesar 9,02% naik 0,23% dibanding tahun 2022 sebesar 8,79%. Mengenai Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2023 mencapai 100, mengalami persamaan tahun 2022, dan Persentase kelompok seni budaya yang aktif pada tahun 2023 mencapai 88,99% meningkat 0,01% dibanding tahun 2022 sebesar 88,98%.

Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 mendapat nilai sebesar 71,20 sama dengan tahun 2022. Penurunan nilai SAKIP ini dikarenakan indikator penilaian yang berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 mendapatkan nilai 84,89 meningkat 4,48% dibandingkan pada tahun 2022 mendapatkan nilai 80,41%.

- 2)
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini Tingkat Kemajuan
- Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Akhir Target	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar				
		Harapan Lama Sekolah	13,71	13,98	98,07
		Rata-rata Lama Sekolah	9,02	8,71	103,56
2	Meningkat nya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan				
		Persentase benda, situs dan kawasan	100	90	111,11

		cagar budaya yang dilestarikan			
		Persentase kelompok seni budaya yang aktif	88,99	13,75	647,2
3	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas				
		Nilai SAKIP	71,20	73	97,53
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,89	81,26	104,47

Pada pencapaian indikator Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar yaitu pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tingkat kemajuannya lebih rendah dibandingkan dengan indiaktor – indikator lainnya. Hal ini disebabkan karena capaian belum tercapai dikarenakan formula perhitungan tidak hanya pada jenjang sekolah dasar (SD, SMP) yang menjadi kewenangan Kabupaten, namun juga jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi dan juga Perguruan tinggi, yang menjadi kewenagan Dikti masuk dalam formulasi.

Tabel Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar				
		Harapan Lama Sekolah	13,71	12,85	106,69 %
		Rata-rata Lama Sekolah	9,02	10,81	83,44 %

Perbandingan capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar jika dibandingkan dengan Standar Nasional dari Provinsi Jawa Tengah ada yang berbeda. Pada Indikator Harapan Lama Sekolah Tingkat Capaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa tengah yakni 13,71 banding 12,85. Untuk indikator Rata-rata Lama sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yakni 9,02 dibanding dengan 10,81.

- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- a. Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar						
		Harapan Lama Sekolah	13,98	13,71	98,07 %	Belum Tercapai	Meningkatkan harapan lama sekolah dengan pendekatan kepada peserta didik untuk melanjutkan sekolah
		Rata-rata Lama Sekolah	8,71	9,02	103,56 %	Tercapai	
2	Meningkat nya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan						
		Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	90	100	111,11 %	Tercapai	
		Persentase kelompok seni budaya yang aktif	13,75	88,99	647,2 %	Tercapai	
3	Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas						
		Nilai SAKIP	73	71,20	97,53 %	Belum Tercapai	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,26	84.89	104,47 %	Tercapai	

Analisis penyebab indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tingkat kemajuannya lebih rendah dibandingkan dengan indikator – indikator lainnya. Hal ini disebabkan karena capaian belum tercapai dikarenakan formula perhitungan tidak hanya pada jenjang sekolah dasar (SD, SMP) yang menjadi kewenangan Kabupaten, namun juga jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi dan juga Perguruan tinggi, yang menjadi kewenangan Dikti masuk dalam formulasi. Solusi dari permasalahan tersebut dengan pendekatan kepada peserta didik untuk melanjutkan sekolah. Indikator yang belum tercapai selanjutnya adalah Nilai SAKIP. Penurunan nilai SAKIP ini dikarenakan indikator penilaian yang berbeda dari tahun sebelumnya

4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Harapan Lama	13,71	98,07%	198.160.634.824	193.542.736.822	97,67	2,33
		Rata-rata Lama Sekolah	9,02	103,56%				
2	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100	111,11%	4.443.739.800	4.423.888.300	99,55	0,45
		Persentase kelompok seni budaya yang aktif	88,99	647,20%				
3	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai SAKIP	71,2	97,53%	604.552.728.994	590.707.908.762	97,71	2,29
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.89	104,47%				

- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- a. Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Harapan Lama Sekolah	98,07%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Menunjang
		Rata-rata Lama Sekolah	103,56%		Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Menunjang
					Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Menunjang
					Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentasi siswa SD yang menerima dana BOS	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentasi siswa SMP yang menerima dana BOS	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Presentase peserta dan PAUD unggulan yang mengikuti kegiatan	60%	Menunjang
				Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Presentase penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan	70%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	80%	Menunjang

				Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan ijin pendidikan PAUD dan NonFormal yang diselenggarakan	60%	Menunjang
2	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	111,11%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Fasilitasi pengembangan Budaya nasional (nusantara)	82%	Menunjang
		Persentase kelompok seni budaya yang aktif	647,20%	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	85%	Menunjang
				Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Rata-rata penyelenggaraan festival seni budaya daerah yang difasilitasi	90%	Menunjang
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	85%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase pengembangan kesenian tradisional	87%	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Rata-rata penyelenggaraan festival seni budaya daerah yang difasilitasi	85%	Menunjang

				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase sejarah lokal yg difasilitasi	25,20%	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Sejarah Lokal yang dikembangkan	65%	Menunjang
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan (kondisi baik dan terawat	60,3%	Menunjang
				Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota	Ditetapkannya cagar budaya	60,5%	Menunjang
3	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai SAKIP	97,53%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	97,53%	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	104,47%				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian jumlah anggaran, program dan pelaporan yang memenuhi target	80%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian penyusunan penganggaran dan laporan keuangan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan Akuntabel	90%	Menunjang

				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	80%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	80%	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang tersedia	75%	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	75%	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik (terdaftar, kondisi baik, jelas lokasinya)	75%	Menunjang

Dari kegiatan atau daya serap keuangan tersebut dapat diperoleh capaian kinerja sebesar 97,71% dari anggaran Rp. 807.157.103.618,- terealisasi Rp. 788.674.533.884,- tidak terealisasi Rp. 18.482.569.734,-. Dari pagu dan capaian kinerja SPKD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dihitung berdasarkan seluruh capaian kinerja sebesar 97,71% capaian kinerja tersebut berada pada rentang 85 - 100 dengan interpretasi “Sangat Berhasil”

III.II Realisasi Anggaran

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran APBDI/APBD II/APBN Kabupaten Bidang Pendidikan Tahun 2023 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	750.933.400,00	717.177.290	95,50
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	147.776.500,00	140.712.500	95,22
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	57.004.000,00	50.104.000	87,90

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	522.940.500,00	506.503.000	96,86
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.000.000,00	110.000.000	100,00
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	590.454.072.494,00	577.317.378.975	97,78
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	312.262.200,00	301.795.200	96,65
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	182.458.000,00	178.168.000	97,65
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.662.500,00	44.081.500	98,70
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	29.102.800,00	29.012.800	99,69
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	141.095.600,00	139.816.600	99,09
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00	19.988.000	99,94
13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	199.500.000,00	193.956.000	97,22
14	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000.000,00	147.663.000	98,44
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000,00	24.930.000	99,72
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	19.780.000	98,90
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.667.781.000,00	1.631.294.261	97,81
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2.855.251.000,00	2.800.097.300	98,07
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.648.000,00	64.570.300	95,45
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	124.925.000,00	124.520.000	99,68
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	512.415.000,00	511.835.000	99,89
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109.333.500,00	103.660.300	94,81
23	Penyediaan Bahan/Material	315.000.000,00	310.821.000	98,67
24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.700.000,00	40.600.000	99,75
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	642.432.500,00	634.090.074	98,70
26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000,00	99.419.300	99,42
27	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	354.511.100,00	352.161.100	99,34

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.340.942.900,00	1.173.603.500	87,52
29	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000.000,00	722.350.230	72,24
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000	100,00
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.211.000,00	6.200.000	99,82
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	495.056.000,00	459.671.721	92,85
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	443.242.000,00	442.710.500	99,88
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.717.000,00	92.251.500	92,51
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.170.755.000,00	1.156.985.811	98,82
36	Penambahan Ruang Kelas Baru	3.815.000.000,00	3.810.317.400	99,88
37	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.941.500.000,00	2.941.500.000	100,00
38	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	5.245.500.000,00	5.245.500.000	100,00
39	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	18.948.000.000,00	18.938.100.000	99,95
40	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	515.000.000,00	500.220.400	97,13
41	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	47.748.000,00	47.747.600	100,00
42	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	245.000.000,00	244.727.000	99,89
43	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	58.535.264.052,00	58.532.774.743	100,00
44	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	7.983.806.000,00	5.694.355.932	71,32
45	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	567.986.100,00	542.491.100	95,51
46	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	3.826.094.000,00	3.657.157.279	95,58
47	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	454.900.000,00	450.360.000	99,00
48	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	11.915.005.000,00	11.361.414.890	95,35
49	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	561.228.800,00	545.303.800	97,16
50	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	295.000.000,00	273.759.800	92,80
51	Penambahan Ruang Kelas Baru	350.000.000,00	350.000.000	100,00
52	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.298.500.000,00	4.294.202.000	99,90
53	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	284.000.000,00	284.000.000	100,00

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
54	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.006.790.000,00	1.005.940.000	99,92
55	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	36.048.514.769,00	36.048.178.769	100,00
56	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	591.000.000,00	547.005.000	92,56
57	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	665.620.000,00	640.016.500	96,15
58	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	611.821.000,00	583.234.750	95,33
59	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	416.958.000,00	396.742.500	95,15
60	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.201.770.000,00	5.007.230.513	96,26
61	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	168.392.000,00	165.925.750	98,54
62	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	510.000.000,00	510.000.000	100,00
63	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.794.606.000,00	1.794.606.000	100,00
64	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	225.000.000,00	225.000.000	100,00
65	Pengadaan Mebel PAUD	55.000.000,00	55.000.000	100,00
66	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	320.000.000,00	314.925.000	98,41
67	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	240.150.000,00	222.255.000	92,55
68	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.671.637.000,00	1.601.873.896	95,83
69	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	347.683.800,00	330.083.000	94,94
70	Pengelolaan Dana BOP PAUD	16.507.659.803,00	15.856.779.100	96,06
71	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	425.000.000,00	425.000.000	100,00
72	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan	30.000.000,00	30.000.000	100,00
73	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	120.000.000,00	112.296.000	93,58
74	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.000.000,00	29.305.000	97,68
75	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.230.800.500,00	4.214.175.500	99,61
76	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.102.700.000,00	5.703.232.600	93,45

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
77	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000	100,00
78	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	150.500.000,00	148.876.000	98,92
79	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.599.859.800,00	1.598.329.800	99,90
80	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	67.000.000,00	66.950.000	99,93
81	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.554.380.000,00	2.541.895.000	99,51
82	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.627.500	99,07
83	Penetapan Cagar Budaya	32.000.000,00	28.210.000	88,16
	JUMLAH KESELURUHAN	807.157.103.618	788.674.533.884	97,71

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran dalam rangka mencapai indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan dapat berperan selain sebagai bahan masukan (input) dalam proses perencanaan berikutnya, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, alat evaluasi kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). Kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja antara Bapak Bupati dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara umum target yang ditetapkan dapat tercapai.

Hal-hal yang dapat dijadikan catatan penting untuk dapat dilakukan pada tahun-tahun mendatang adalah meningkatkan pencapaian kinerja/outcome, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm) melalui berbagai pelatihan, diklat, workshop dan sejenisnya;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama;
3. Pendayagunaan kegiatan secara cermat dan prioritas ;

4. Pembentukan tim solid;
5. Sarana kerja yang lengkap;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan, serta bahan evaluasi khususnya yang terkait pendidikan dan kebudayaan.